



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Kamis

Tanggal: 19 Agustus 2021

Halaman: 2

HADAPI POTENSI LONJAKAN WISATAWAN USAI PPKM

Pemkot Wacanakan 'One Gate System' Bus Pariwisata

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya mewacanakan kebijakan 'One Gate System' atau satu pintu masuk bagi armada bus pariwisata. Terutama bus yang membawa wisatawan dari luar daerah dengan tujuan berbagai destinasi di Kota Yogya.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, menjelaskan satu pintu masuk Kota Yogya tersebut diarahkan melalui Terminal Giwangan.

"Semua bus yang mau masuk ke Yogya harus melalui Terminal Giwangan semua. Di terminal itu nanti akan diperiksa kemudian diarahkan tempat parkir serta rute masuknya," jelasnya, Rabu (18/8).

Pemeriksaan di Terminal Giwangan meliputi kartu vaksin serta identitas kesehatan bagi seluruh penumpang. Hal ini karena destinasi wisata utama di Kota Yogya sudah dicanangkan kawasan wajib vaksin dan akan diperluas hingga tingkat kota.

Heroe menandakan, bagi armada bus pariwisata yang sudah dinilai melengkapi protokol kesehatan maka akan diberikan surat keterangan dari Dinas Perhubungan. Sementara bagi yang tidak lengkap, maka tidak diperbolehkan masuk ke Kota Yogya.

"Surat dari Dinas Perhubungan itu nanti harus ditunjukkan ketika hendak parkir. Ketika tidak memiliki surat berarti tidak bisa parkir dan masuk destinasi wisata," tandasnya.

Kebijakan 'One Gate System' tersebut, imbuhnya untuk menekankan protokol perjalanan antar kota. Selain itu juga melindungi warga kota dan pelaku wisata sekaligus penataan arus lalu lintas di Kota Yogya. Pasalnya bus pariwisata sudah ditunjukkan rute perjalanan berikut tempat parkirnya.

Selain itu khusus di Malioboro juga diberlakukan pembatasan durasi kunjungan yakni 2-3 jam bagi armada bus maupun pengunjung. Pembatasan durasi itu hingga saat ini masih terus disimulasikan dengan melibatkan unsur kepolisian, TNI, komunitas masyarakat maupun pelaku wisata di Malioboro. Dengan begitu arus masuk Malioboro bisa dikendalikan serta jumlah kunjungan diantisipasi supaya tidak menimbulkan kerumunan dalam jumlah besar.

Kebijakan baru yang akan diterapkan usai PPKM ini, imbuh Heroe, harus dipahami semua pihak. Dari berbagai pengalaman sebelumnya setiap aktivitas besar atau liburan sering diikuti dengan naiknya kasus Covid-19. Sehingga perlu diantisipasi dan adaptasi dengan pola penanganan melalui protokol yang baru. Sehingga semua pihak harus mampu mengupayakan agar ke depan kondisi sosial ekonomi bisa lebih kondusif.

"Kita mencoba membuat perubahan, bahwa aktivitas dan wisata di masa pandemi akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita semua tidak ingin kasus meningkat terus kemudian diterapkan lagi PPKM. Agar kondisi itu tidak terus berulang maka kita harus membuat perubahan dan mendapat dukungan semua pihak," paparnya.

(Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005